

ABSTRAK

Nama :Suci Nuraeni
Nim :1213020169
Judul :Penyelesaian Sengketa Keabsahan Lelang Terhadap Hak Tanggungan Pada Akad Musyarakah Dalam Putusan Banding Di Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 61/Pdt.G/2024/Pta.Bdg

Penelitian ini dilatar belakangi oleh putusan pengadilan terkait keabsahan lelang tanah sebagai objek hak tanggungan. Sengketa yang diselesaikan melalui jalur litigasi menghasilkan putusan yang saling bertentangan: *pertama* menyatakan lelang sah. *kedua* menilai adanya perbuatan melawan hukum. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum, terutama jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Tujuan dari penelitian ini yaitu Pertama, mengetahui Duduk Perkara Sengketa Keabsahan Modal Akad Musyarakah Dan Keabsahan Lelang Terhadap Hak Tanggungan Dalam Putusan Banding Di Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 61/Pdt.G/2024/Pta.Bdg.. Kedua, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 61/Pdt.G/2024 PTA.Bdg. Ketiga , untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perbuatan Melawan hukum Dalam perjanjian Akad Pembiayaan Musyarakah terhadap Lelang Dan keabsahan Akad Musyarakah pada Putusan Banding Nomor 61/Pdt.G/2024 PTA.Bdg.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis yuridis normatif Data dikumpulkan dengan melakukan penelitian pustaka terhadap literatur hukum positif dan hukum Islam serta menganalisis dua putusan pengadilan yaitu Pengadilan tingkat pertama dengan nomor putusan 430/Pdt.G/2023/PA.Cn dan banding dengan nomor putusan 61/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

Kerangka teori meliputi teori keadilan, kepastian hukum, asas kebebasan berkontrak, prinsip wanprestasi, perlindungan hak jaminan, dan prosedur lelang.

Hasil pembahasan pada putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Cn dan 61/Pdt.G/2024/PTA.Bdg Pertama lelang dilaksanakan tanpa persetujuan semua pihak dalam akad musyarakah. mengakibatkan sengketa dan tidak sesuai teori *as-sulhu* kedua terdapat perbedaan interpretasi hakim mengenai hak tanggungan dalam perjanjian syariah dan kurangnya penerapan prinsip keadilan syariah. Ketiga tindakan lelang sepihak tanpa mediasi menunjukkan adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum,

Kata Kunci: Akad Musyarakah, Lelang, Hak Jaminan, Perbuatan Melawan Hukum Wanprestasi